

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berada pada masa transisi dari masa persaingan global, menuju ke arah masa persaingan informasi dituntut untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik demi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk memudahkan pendekatan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan pembagian wilayah dengan dasar pikir bahwa organisasi pemerintah pada tingkat lebih rendah dapat memahami dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen.

Salah satu lembaga pemerintahan di Kabupaten Alor juga merupakan lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan di Kabupaten Alor umumnya dibentuk untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat Alor. Sebagai organisasi nirlaba, lembaga pemerintahan di Kabupaten Alor mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan

lain-lain. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat

Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak bulan Januari tahun 2001 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rondonuwu dkk (2015) penelitian ini berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari hasil penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah di Kabupaten Alor juga dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah Kabupaten Alor.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Alor pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kabupaten Alor, karena itu Pemerintah Kabupaten Alor sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah Kabupaten Alor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Penelitian yang dilakukan oleh Tambunan (2014) penelitian ini berjudul Analisis Kinerja Keuangan pada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012- 2014. Tujuan dari penelitian ini Untuk Menganalisis Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Dalam Pengelolaan APBD tahun Anggaran

2012 Sampai 2014. Hasil Penelitian ini menunjukkan Kinerja Pemerintah dalam mengelola pendapatannya dikatakan baik ini dibuktikan dari varians pendapatan yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatannya melebihi dari yang telah di anggarkan.

Analisis kinerja keuangan pada badan keuangan dan aset daerah (BKAD) di Kabupaten Alor adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan BKAD Kabupaten Alor dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah di Kabupaten Alor Tahun 2012-2021**”.

### **1.2. Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka masalah penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Alor.

### **1.3. Persoalan Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian di atas maka persoalan dalam penelitian ini penelitian adalah:

Bagaimana kinerja keuangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Alor?

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan persoalan penelitian maka tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja Keuangan Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada Badan Keuangan dan Aset daerah di Kabupaten Alor.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Akademik**

Mebagai dasar pengenalan untuk menambah pengetahuan dengan menggabungkan teori yang didapat dalam perkuliahan dengan kenyataan, serta dapat memperdalam pengetahuan penulis dalam bidang untuk mengetahui Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Alor.

#### **b. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang didapat selama perkulihaan dan para mahasiswa yang akan berkarir dalam bidang akuntansi.
2. Penelitiahn ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitia selanjutnya.

### **3. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Membawah wawasan dan pengetahuan mengenai cara menganalisis kinerja keuangan pada badan keuangan dan aset daerah di kabupatrn alor.

**b. Bagi Pembaca**

Memberi tambahan reference bagi pembaca dalam mengaplikasikan dalam kehidupan nyata.

**c. Bagi Kantor Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Alor**

Sebagiaia bahan masukan atau informasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk pengembangan dan kemajuan kinerja keuangan Di Kabupaten Alor.